

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi formula pengupahan sektoral bagi pekerja anak buah kapal yang tidak terlaksanakan secara maksimal. Pengupahan ini tertulis dalam perjanjian kerja laut yang menjadi dasar pemberian upah oleh pemilik kapal kepada pekerja anak buah kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi formula pengupahan sektoral bagi anak buah kapal perikanan berdasarkan perjanjian kerja laut. Secara khusus, penelitian ini berfokus terhadap landasan pemberian upah kepada para awak kapal, tujuan ditetapkan upah sektoral dan pentingnya kedudukan serta fungsi perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya upah yang diterima oleh pekerja anak buah kapal (ABK) tidak sesuai dengan risiko pekerjaan sangat tinggi, sehingga diperlukan perhatian terkait karakteristik pekerjaan, hak dan kewajiban pemilik kapal dan anak buah kapal, khususnya mengenai peraturan pengupahan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum untuk tugas akhir ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep formal teoritis yang kemudian digabungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan melalui hasil studi pustaka, selanjutnya disajikan dalam bentuk analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, upah yang diterima pekerja anak buah kapal (ABK) belum sepenuhnya sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan mempengaruhi menurunnya tingkat kesejahteraan para anak buah kapal khususnya di sektor perikanan. *Kedua*, kedudukan perjanjian kerja laut sangat penting antara lain mengatur hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerja anak buah kapal (ABK), menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat serta mengatur kondisi kerja. *Ketiga*, dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pengawasan serta mengenalkan secara rinci perjanjian kerja laut, sehingga hak dan kewajiban pemilik kapal beserta awak kapal terpenuhi. Menindaklanjuti hambatan tersebut diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi oleh pemerintah serta penegakan hukum khususnya dalam penyusunan perjanjian kerja laut, sehingga hak dan kewajiban pekerja anak buah kapal terpenuhi termasuk dalam hal pengupahan.

Kata kunci : Pekerja Anak Buah Kapal (ABK), Pengupahan, Perjanjian Kerja Laut (PKL).

ABSTRACT

This research was motivated by the implementation of the sectoral wage formula for ship crew workers which was not implemented optimally. This remuneration is written in the maritime work agreement which is the basis for providing wages by the ship owner to the ship's crew workers. This research aims to find out how the sectoral wage formula for fishing vessel crew members is implemented based on maritime work agreements. In particular, this research focuses on the basis for providing wages to ship crew, the objectives of determining sectoral wages and the importance of the position and function of maritime work agreements in accordance with applicable statutory provisions. However, in reality the wages received by ship crew workers (ABK) do not correspond to the very high risk of work, so attention is needed regarding job characteristics, rights and obligations of ship owners and ship crew, especially regarding wage regulations in Indonesia.

The research method used in legal research for this final assignment uses a legal research approach normative juridical. Approach normative juridical This is done by examining various formal legal regulations such as laws, regulations and literature containing formal theoretical concepts which are then combined with the problems that will be discussed in this research. Data collected through literature studies is then presented in the form of qualitative analysis.

The research results show that First, The wages received by ship crew workers (ABK) are not fully in accordance with the legal basis of laws and regulations. This will affect the decline in the level of welfare of ship crew, especially in the fisheries sector. Second, The position of a maritime work agreement is very important, among other things, regulating the work relationship between the ship owner and the ship's crew (ABK), determining the rights and obligations of the parties involved and regulating working conditions. Third, Efforts are needed from the government to increase supervision and introduce detailed maritime work agreements, so that the rights and obligations of ship owners and crew are fulfilled. Following up on these obstacles requires increased monitoring and evaluation by the government as well as law enforcement, especially in the preparation of maritime work agreements, so that the rights and obligations of ship crew workers are fulfilled, including in terms of wages.

Keywords : *Ship Crew Workers, Wages, Sea Work Agreements.*